



POLITEKNIK NEGERI BALI

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PIHAK INTERNAL**

2021



TIM AREA PENGAWASAN ZI WBK

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi diterbitkan peraturan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 oleh Kementerian PAN dan RB tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata.

Politeknik Negeri Bali merupakan salah satu unit penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan publik serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hasil indeks persepsi korupsi dapat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .

B. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi korupsi dari pengguna layanan Politeknik Negeri Bali sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan layanan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan pelaksanaan layanan yang bebas korupsi.

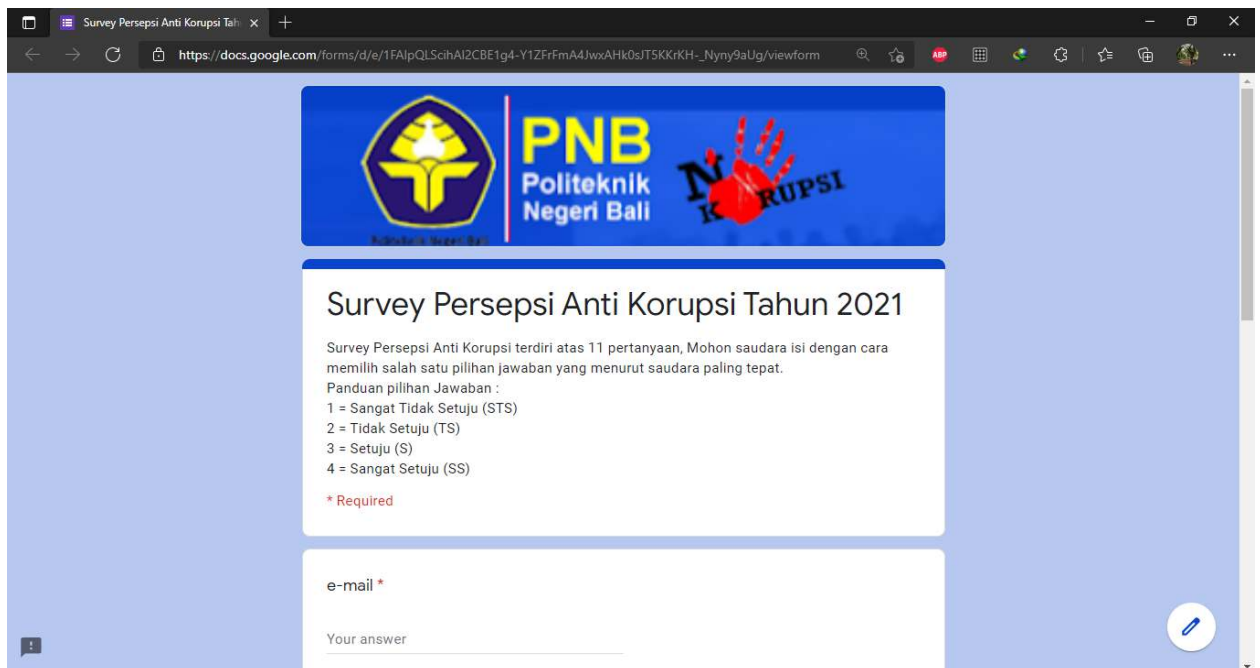
BAB 2

METODOLOGI

Survei indeks persepsi korupsi ditujukan untuk menilai pelayanan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali kepada pengguna layanan, seperti mahasiswa, DIDUKA, dan rekanan. Metode sampling yang digunakan dalam kajian ini adalah metode *simple random sampling*. Sampel dalam survei ini adalah responden yang masuk selama bulan Juli 2021, sehingga data yang diolah merupakan data yang terkumpul selama periode tersebut. Adapun prosedur yang dilakukan dalam melakukan survei ini adalah sebagai berikut:

- Membuat daftar pertanyaan yang terkait dengan persepsi korupsi.
- Membuat formulir survei atas daftar pertanyaan yang sudah disusun.
- Melakukan penyebaran formulir survei. Survei dilakukan dengan mengakses link berikut:

[Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021 \(google.com\)](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciAI2CBE1g4-Y1ZFrFmA4JwAHk0sJT5KkRKH-Nyny9aUg/viewform)



The image shows a screenshot of a Google Forms survey. At the top, there is a blue header with the Politeknik Negeri Bali (PNB) logo on the left and the text 'PNB Politeknik Negeri Bali' and 'No KORUPSI' on the right. Below the header, the title of the survey is 'Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021'. The main content area contains the following text: 'Survey Persepsi Anti Korupsi terdiri atas 11 pertanyaan, Mohon saudara isi dengan cara memilih salah satu pilihan jawaban yang menurut saudara paling tepat. Panduan pilihan Jawaban : 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Setuju (S) 4 = Sangat Setuju (SS)'. Below this, there is a red asterisk and the word 'Required'. At the bottom of the form, there is a field labeled 'e-mail *' with a red asterisk, and a text input area labeled 'Your answer'.

Teknis Analisis dan Evaluasi

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor

persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Responden memilih jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju untuk mengukur masing-masing indikator persepsi korupsi.
2. Jawaban tersebut kemudian dicari bobot rata-ratanya di setiap indikator. Skala indeks persepsi korupsi mendekati nilai 4 mencerminkan penilaian korupsi semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	A	Bersih dari Korupsi

Prosedur Survei

Responden dapat mengisi survei melalui google form persepsi korupsi terhadap pengurusan pelayanan baik melalui komputer/laptop/smartphone. Untuk mengetahui tingkat IPK pelayanan akademik dan non akademik dilingkungan Politeknik Negeri Bali yang ditujukan kepada pihak internal, seperti dosen dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam survei. Kajian survei ini menggunakan acuan yang telah dilakukan oleh lembaga lainnya dan disimpulkan beberapa indikator yang mencerminkan persepsi mengenai korupsi adalah sebagai berikut:

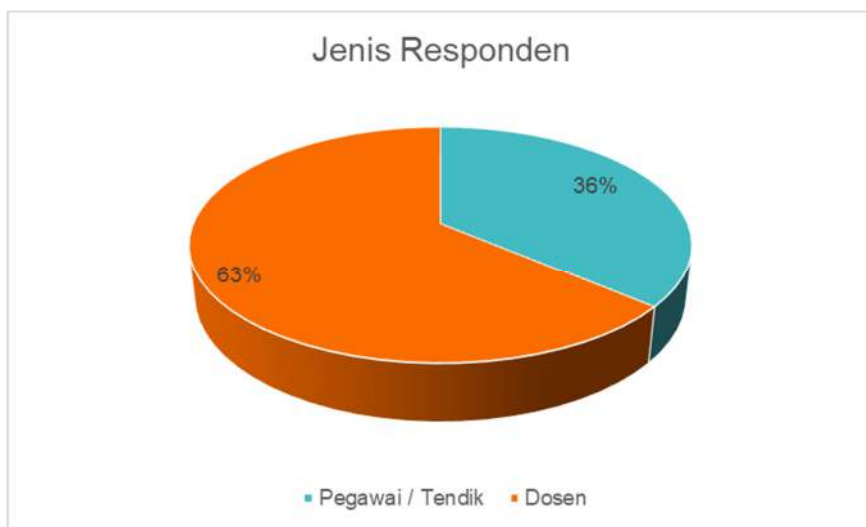
1. Perbuatan curang
2. Gratifikasi
3. Pungutan liar
4. Praktik Pencaloan / Perantara
5. Memberi tarif yang lebih dari yang seharusnya
6. Penawaran imbalan
7. Petugas terindikasi menghendaki praktik suap
8. Hadiah
9. Praktik KKN dalam pengurusan pelayanan
10. Kegiatan/media anti korupsi

BAB 3

HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

Berdasarkan metode sampling yang digunakan, jumlah responden survei indeks persepsi korupsi terhadap pengurusan pelayanan baik akademik dan non akademik mencapai 149 responden yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.



Pengisian survei ini dilaksanakan tanpa adanya arahan dalam memberi jawaban. Hal ini dapat terlihat pada hasil berikut:



B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1 Perbuatan Curang



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat praktik kecurangan dalam layanan di Politeknik Negeri Bali. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,70.

2 Gratifikasi



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat permintaan/penerimaan imbalan di luar ketentuan atas layanan yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,79.

3 Pungutan Liar



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat pungutan liar atas setiap layanan yang diberikan di Politeknik Negeri Bali. Hal ini dapat dilihat pada indeks yang mencapai 3,81.

4 Praktik Pencaloan / Perantara



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Politeknik Negeri Bali. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,79.

5 Memberi tarif yang lebih dari yang seharusnya



Hasil persepsi responden bahwa biaya masih terdapat biaya layanan yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,69.

6 Penawaran Imbalan



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat penawaran dalam rangka memperoleh setiap layanan yang lebih cepat dengan imbalan tertentu. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,78.

7 Petugas Terindikasi Menghendaki Praktik Suap



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat permintaan komisi dalam pengurusan di setiap layanan. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,79.

8 Hadiah



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat pemberian tanda terima kasih selain ucapan terima kasih atas setiap layanan yang diberikan, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,75.

9. Praktik KKN dalam Pengurusan Layanan



Hasil persepsi responden bahwa tidak terdapat praktik KKN dalam pengurusan layanan di Politeknik Negeri Bali. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,74.

10. Kegiatan/Media Anti Korupsi



Hasil persepsi responden bahwa sudah terdapat kegiatan / media anti korupsi di Politeknik Negeri Bali. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,65.

11. Analisis Survei

Survei yang dilakukan menggunakan media Google Form yang disebarakan kepada 150 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif yang diisi oleh pihak internal Politeknik Negeri Bali. Indeks IPK memiliki skala antara 1 yang artinya sangat korup sampai dengan 4 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada pengurusan pelayanan baik akademik maupun non akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bali. Indeks IPK merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 oleh Kementerian PAN dan RB tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.. Selanjutnya, berikut nilai per indikator IPK dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

Nilai Per Indikator dari Indeks Persepsi Korupsi

No	Indikator	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Perbuatan curang	3,70	A
2	Gratifikasi	3,79	A
3	Pungutan liar	3,81	A
4	Praktik pencaloan / perantara	3,79	A
5	Memberi tarif yang lebih dari yang seharusnya	3,69	A
6	Penawaran imbalan	3,78	A
7	Petugas terindikasi menghadapi praktik suap	3,79	A
8	Hadiah	3,75	A
9	Praktik KKN dalam pengurusan layanan	3,74	A
10	Kegiatan/media anti korupsi	3,65	A
	Rata-rata	3,75	A

Jumlah nilai persepsi korupsi per indikator menunjukkan penilaian pihak eksternal terhadap indikator unsur korupsi dalam pengurusan pelayanan. Unsur-unsur pelayanan SKP berada pada jumlah kisaran interval 3,26 – 4,00 atau mutu pelayanan A (BERSIH DARI KORUPSI).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 10 indikator memiliki nilai persepsi tertinggi dengan mutu layanan A. Dari sepuluh indikator tersebut, indikator kegiatan/media anti korupsi memiliki nilai terendah sebesar 3,65. Hal ini mengindikasikan kegiatan / media anti korupsi belum secara maksimal tersosialisasi ke pihak internal. Namun hal ini masih dalam batas wajar dan tidak berpotensi menimbulkan KKN. Untuk meningkatkan tersosialisasinya kegiatan / media anti korupsi telah dilakukan penambahan kegiatan kampanye media anti korupsi melalui media online berupa Instagram dan Website. Juga melalui internalisasi dari pimpinan kepada sivitas akademika dalam beberapa kegiatan-kegiatan kampus.

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi korupsi pada Politeknik Negeri Bali diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,75 atau masuk kategori bersih dari korupsi (kisaran nilai 3,25 – 4,00). Dengan demikian, petugas yang ada di Lingkungan Politeknik Negeri Bali dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu kegiatan/media anti korupsi, namun masih dalam kategori bersih dari korupsi. Hal ini masih dalam batas wajar dan tidak berpotensi menimbulkan KKN yang material.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei IPK terhadap pengurusan pelayanan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bali, maka perlu kegiatan sosialisasi media anti korupsi berupa kampanye lebih sering dilakukan. Bentuk kampanye dapat dilakukan dengan penambahan kegiatan kampanye media anti korupsi melalui media online berupa Instagram dan Website. Juga melalui internalisasi dari pimpinan kepada sivitas akademika dalam beberapa kegiatan-kegiatan kampus..